

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan harus mempunyai kesesuaian dan berkaitan dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian sekarang diantaranya yaitu:

2.1.1 Ika Surya Martsila dan Wahyu Meiranto (2013)

Ika & Wahyu (2013) menguji tentang “pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan”. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 – 2010. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dengan ROA, sementara komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA dan Tobins’Q.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang:

- a. Variabel dependen sama – sama kinerja perusahaan.
- b. Metode pengumpulan data sama – sama secara sekunder dimana data diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.
- c. Teknik pengambilan sampel sama – sama menggunakan *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang:

- a. Penelitian ini menggunakan dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajemen, konsentrasi kepemilikan, dan *leverage* sebagai variabel independen. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel independen.
- b. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel kontrol.
- c. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2009 – 2011. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor *consumer and goods* yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2018.

2.1.2 Melia Agustina Turtius dan Yulius Yogi Christiawan, S.E., M.Si, Ak. (2015)

Melia & Yulius (2015) menguji tentang “pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan”. Untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2013. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang:

- a. Variabel dependen sama – sama kinerja perusahaan.
- b. Teknik pengambilan sampel sama – sama menggunakan *purposive sampling*.
- c. Metode pengumpulan datanya sama – sama secara sekunder dimana data diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang:

- a. Penelitian ini menggunakan dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel independen.
- b. Sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2011 – 2013. Sedangkan, sampel penelitian sekarang yaitu perusahaan manufaktur sektor *consumer and goods* tahun 2014 – 2018.

2.1.3 Fery Ferial, Suhadak, dan Siti Ragil Handayani (2016)

Fery *et al.*, (2016) menguji tentang “pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dan efeknya terhadap nilai perusahaan”. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2012 – 2014. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling* yang merupakan “teknik penentuan sampel dengan kriteria atau pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2012:216). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* (komite audit dan komisaris independen) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang:

- a. Variabel dependen sama – sama kinerja perusahaan.
- b. Metode pengumpulan data sama – sama secara sekunder dimana data diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.
- c. Teknik pengambilan sampel sama – sama menggunakan *purposive sampling*.

Perbedaan peneliti ini dengan penelitian sekarang:

- a. Penelitian ini menggunakan komite audit dan dewan komisaris independen sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel independen.
- b. Sampel penelitian ini yaitu perusahaan BUMN *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014. Sedangkan, sampel penelitian sekarang yaitu perusahaan manufaktur sektor *consumer and goods* tahun 2014 – 2018.

2.1.4 Mayang Maharani dan Noorlailie Soewarno (2018)

Mayang & Noorlailie (2018) menguji tentang “*the effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earnings management as mediating variable*”. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana sampel penelitian ini yaitu 102 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software *warpPLS* 5.0. Hasil penelitian ini yaitu mekanisme *good corporate governance* (dewan komisaris dan komisaris independen) mempunyai pengaruh positif signifikan dan

corporate social responsibility mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang:

- a. Variabel dependen sama – sama kinerja keuangan.
- b. Metode pengumpulan data sama – sama menggunakan *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang:

- a. Penelitian ini menggunakan komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit serta *corporate social responsibility* sebagai variabel independen. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel independen.
- b. Penelitian ini menggunakan manajemen laba sebagai variabel mediasi. Sedangkan, penelitian sekarang tidak menggunakan variabel mediasi.
- c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Partial Least Square* (PLS). Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan regresi analisis berganda.
- d. Sampel penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014. Sedangkan, sampel penelitian sekarang yaitu perusahaan manufaktur sektor *consumer and goods* tahun 2014 – 2018.

Untuk memperjelas pemahaman pembaca tentang persamaan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Keterangan	Ika Surya Martsila dan Wahyu Meiranto	Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, SE., M.Si, Ak.	Fery Ferial, Suhadak, dan Siti Ragil Handayani	Mayang Mahrani dan Noorlailie Soewarno	Peneliti Sekarang
1.	Tahun	2013	2015	2016	2018	2019
2.	Sampel	Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011	Perusahaan sektor keuangan tahun 2011-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Perusahaan BUMN <i>go public</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014	Perusahaan manufaktur sektor <i>consumer and goods</i> yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018
3.	Variabel Dependen	Kinerja Perusahaan	Kinerja Perusahaan	Kinerja Perusahaan	Kinerja Perusahaan	Kinerja Perusahaan
	Variabel Independen	<i>Corporate governance</i> (dewan komisaris independensi, ukuran dewan, kepemilikan manajemen, konsentrasi kepemilikan dan <i>leverage</i>)	<i>Good Corporate Governance</i> (dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial)	<i>Good Corporate Governance</i> (komite audit dan dewan komisaris independen)	<i>Good Corporate Governance</i> (dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kualitas audit) dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Good Corporate Governance</i> (ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komisaris independen, dan ukuran komite audit)
4.	Teknik Pengambilan Sampel	<i>Purposive sampling</i>	<i>Purposive sampling</i>	<i>Purposive sampling</i>	<i>Purposive sampling</i>	<i>Purposive sampling</i>

5.	Metode Pengumpulan Data	Secara sekunder dimana data berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 yang diperoleh melalui situs BEI	Secara sekunder dimana data berupa laporan keuangan perusahaan sektor keuangan dari tahun 2011-2013 yang diperoleh melalui situs BEI	Secara sekunder dimana data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan <i>annual report</i> BUMN periode 2012-2014 yang diperoleh melalui situs BEI	Secara sekunder dimana data berupa laporan keuangan perusahaan dan <i>annual report</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 yang diperoleh melalui situs BEI	Secara sekunder dimana data diperoleh dari laporan keuangan dan <i>annual report</i> perusahaan manufaktur sektor <i>consumer and goods</i> dari tahun 2014-2018 yang diperoleh melalui situs BEI
6.	Teknik Analisis	Analisis regresi linier berganda	Analisis regresi linier berganda	Analisis <i>Partial Least Square</i>	Analisis <i>Partial Least Square</i>	Analisis regresi linier berganda
7.	Hasil Penelitian	Komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan signifikan terhadap ROA dan Tobins'Q. Pada variabel ukuran dewan komisaris juga didapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dengan ROA.	Dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.	<i>Good corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.	Pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i> (komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kualitas audit) terhadap kinerja keuangan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. <i>Corporate social responsibility</i> juga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.	-

Sumber: Ika Surya Martsila dan Wahyu Meiranto (2013), Melia Agustina Turtius dan Yulius Jogi Christiawan, SE., M.Si, Ak. (2015), FEry Ferial, Suhadak, dan Siti Ragil Handayani (2016), Mayang Mahrani dan Noorlailie Soewarno (2018)

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai dasar dalam penelitian dan sebagai pemecahan masalah.

2.2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* dengan *agent*. Pada suatu korporasi, *principal* mengacu pada pemilik, sedangkan *agent* mengacu pada pengelola. Seorang pemilik (*principal*) akan memberikan wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk mengelola jalannya perusahaan dengan harapan *agent* akan memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuan dari pemilik yakni memaksimalkan nilai dari perusahaan. Oleh karena itu, pemilik memberi wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Namun, terpisahnya kepemilikan dengan pengelolaan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. Permasalahan tersebut sering disebut sebagai masalah agensi. Permasalahan tersebut dapat diminimalisir melalui suatu mekanisme yang dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan *principal*. Mekanisme tersebut terdiri dari dua mekanisme kontraktual yakni *monitoring* dan *bonding*. *Monitoring* adalah mekanisme yang sengaja dibuat oleh *principal* untuk mengawasi *agent*. Mekanisme *monitoring* dilakukan dengan membentuk dewan pengawas (dewan komisaris) serta melibatkan para pemegang saham dalam mengawasi jalannya perusahaan melalui penggunaan hutang, maupun melibatkan pengelola perusahaan melalui kontrak kepemilikan manajerial (Jensen & Meckling, 1976).

Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa manajer sebagai orang dalam perusahaan memiliki keuntungan informasi dibandingkan dengan investor yang merupakan orang luar perusahaan. Manajer dapat mengeksploitasi keuntungan tersebut melalui pengelolaan informasi yang disampaikan kepada investor. Kondisi ini dikenal dengan istilah *adverse selection*. Jenis lain asimetri informasi adalah *moral hazard*. Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan mendorong manajer untuk tidak memaksimalkan usahanya.

Suatu masalah keagenan yang dihadapi investor dalam perusahaan mengacu pada kesulitan investor untuk memastikan bahwa dananya tidak disalahgunakan oleh manajemen perusahaan untuk mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan (Wulandari, 2011). Menurut Jensen & Meckling (1976), penyebab konflik antara manajer dan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan.

2.2.2 Teori Stakeholder

Hal pertama mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggungjawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya* (Nur & Priantina, 2012). Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab

(Freeman, 1984). Friedman (1962) mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa definisi *stakeholder* awalnya hanya mengacu pada pemilik perusahaan. Namun, Freeman (1984) memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konsistuen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan bagi perusahaan.

Stakeholder pada dasarnya adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber – sumber ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007). Ullman (1985) mengatakan karena kemampuan dari *stakeholder* ini maka organisasi lebih memilih *stakeholder* yang dianggap penting dan dapat menghasilkan hubungan yang harmonis antar perusahaan dengan *stakeholdernya*. Nugroho (2014) mengatakan untuk menunjukkan keselarasan hubungan ini, setiap perusahaan diharapkan memiliki perhatian dan tanggungjawab yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial.

Menurut Ghazali & Chariri (2007) kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari aktivitas tersebut. Menurut Nugroho (2014) perusahaan harus mempertanggungjawabkan kepada semua kelompok dalam komunitas dan masyarakat yang berkepentingan dengan bisnis sebab perusahaan mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya masyarakat mempengaruhi perusahaan. Meskipun *stakeholder theory* dapat memperluas perspektif pengelolaan perusahaan dan mengenalkan hubungan antara perusahaan dengan

stakeholdernya, namun secara luas *stakeholder theory* belum mampu menjelaskan pengaruh masyarakat terhadap perusahaan.

2.2.3 Good Corporate Governance

Good corporate governance diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholdernya*. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Selain itu untuk mewujudkan perusahaan yang *good corporate* terdapat beberapa asas yang juga perlu diperhatikan diantaranya yaitu *transparency* yaitu keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Accountability* yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. *Responsibility* yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. *Independency* yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang – undang serta prinsip korporasi yang sehat. Dan asas yang terakhir yaitu *fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang – undang.

Menurut Effendi (2009, p. 1) *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan untuk mengelola resiko melalui pengamatan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham

dalam jangka panjang. *Corporate governance* menyediakan seperangkat peraturan dan regulasi yang ditujukan pada *current stakeholder* maupun *stakeholder* potensial yang berpengaruh kepada keputusan yang diambil oleh pihak manajemen untuk menentukan distribusi hak dan kewajiban antar *stakeholder* (Khan & Awan, 2012). Keberhasilan pelaksanaan *good corporate governance* sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris (Ross & Crossan, 2012). Dewan komisaris sendiri dirancang untuk memantau konflik kepentingan dalam upaya untuk memastikan baik kepemilikan maupun komponen kontrol pada akhirnya akan berkontribusi pada maksimalisasi nilai perusahaan (Ehikioya, 2009). Puspitasari & Ernawati (2010) menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh manajer akan lebih ketat ketika kepemilikan saham terkonsentrisasi. Dengan adanya kepemilikan saham terkonsentrasi maka keragaman kepentingan pemegang saham berkurang sehingga ada kemungkinan kerja sama antara pihak manajer dan pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan. Isshaq *et al.*, (2009) menyatakan bahwa selain itu, komponen kontrol lain untuk menciptakan *good corporate governance* adalah dengan melibatkan manajemen selaku pengelola dalam kepemilikan atas perusahaan melalui kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme internal yang dianggap mampu menyelaraskan kepentingan pengelola dengan kepentingan para pemegang saham.

Nur'ainy, Nurcahyo, A, & B (2013) menyatakan bahwa tujuan utama dari *good corporate governance* yaitu untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber

daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. *Good corporate governance* yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan – tujuan bagi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya serta memfasilitasi pengawasan yang efektif (OECD, 2004).

2.2.4 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan komponen penting dalam mekanisme internal yang memungkinkan pemecahan masalah lembaga yang melekat dalam mengelola setiap organisasi. Dewan komisaris bertugas mewakili kepentingan pemegang saham dan merupakan salah satu mekanisme yang dirancang untuk memantau konflik kepentingan dalam upaya memastikan bahwa baik pemilik maupun komponen kontrol pada akhirnya akan berkontribusi pada maksimalisasi nilai perusahaan (Ehikioya, 2009). Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Agar dewan komisaris dapat menjalankan tugasnya secara efektif, mengambil keputusan secara tepat dan tepat waktu, serta bertindak secara independen, komposisi dari dewan komisaris harus diperhatikan (KNKG, 2006). Pengukuran dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan (El – Chaarani, 2014).

Ukuran dewan komisaris = Jumlah anggota dewan komisaris (1)

2.2.5 Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang harus dipenuhi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak independen. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah dewan direksi yang ada pada suatu perusahaan.

Dewan direksi = Jumlah anggota dewan direksi (2)

2.2.6 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan bagian dari perusahaan, dimana memiliki tugas untuk mengawasi manajer dalam melakukan tugasnya dalam melaporkan laporan keuangan dan untuk menjalankan dan menerapkan standar sistem *good corporate governance* dalam perusahaan dengan baik dan benar serta komisaris independen harus dapat bersikap independen, dewan komisaris independen dipilih langsung oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Menurut Rahmawati (2013) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan kepemilikan saham dan atau pemegang pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tiswayanti (2013)

menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis yang mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen, komisaris independen diproksinya dengan menggunakan indikator presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Menurut El – Chaarani (2014) Bursa Efek Indonesia mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris.

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Anggota dewan komisaris independen luar perusahaan}}{\text{Total anggota dewan komisaris}} \times 100\% \dots\dots (3)$$

2.2.7 Komite Audit

Komite audit adalah sebuah komite kecil dari dewan direksi yang independen dan di luar direktur. Komite audit mempunyai tanggungjawab yang luas terhadap laporan ekstern perusahaan, memonitor risiko, mengontrol serta menjalankan fungsi audit internal dan eksternal. Menurut Schwieger dan Rottenberg (2003, p. 223) Komite audit bertindak sebagai pemeriksa manajemen yang independen dan sebagai pengacara bagi pengguna luar laporan keuangan dalam menjamin bahwa laporan keuangan disajikan secara akurat yang menggambarkan kegiatan ekonomi perusahaan. Ikatan Komite Audit Indonesia (2004) menyatakan bahwa selain perangkat hukum, keberadaan komite audit di Indonesia juga didukung dengan didirikannya suatu badan khusus yang menangani permasalahan komite audit di Indonesia, yakni Ikatan Komite Audit Indonesia (*The Indonesian Institute Of Audit Commitee*). Badan khusus ini merupakan badan yang akan memayungi serta melakukan pendidikan dan pengakuan terhadap kualifikasi anggota komite audit

dalam rangka mempercepat transformasi perusahaan menuju *good corporate governance*. Indikator pengukuran komite audit dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota komite audit yang ada dalam suatu perusahaan.

Komite audit = Jumlah komite audit perusahaan (4)

2.2.8 Kinerja Keuangan

Helfert (1996) menyatakan bahwa kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber – sumber daya yang dimiliki. Kinerja perusahaan ditinjau dari perspektif keuangan. Strategi perusahaan dalam perspektif keuangan secara jangka panjang mempengaruhi nilai pemegang saham.

Jumingan (2006, p. 240) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan perusahaan yaitu review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Mulyadi (2001, p. 420) mengatakan bahwa pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan. Semua ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan rangsangan pada masing – masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas diantaranya yaitu:

a. *Return on Assets (ROA)*

Syamsuddin (2009, p. 64) menyatakan bahwa ROA merupakan rasio pengukuran yang menggambarkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan perusahaan dalam setiap rupiah yang ditanamkan dalam bentuk asset.

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Asset} \dots\dots\dots (5)$$

b. *Return on Equity (ROE)*

Menurut Syamsuddin (2009, p. 65) ROE merupakan rasio pengukuran yang menunjukkan seberapa besar pendapatan yang diterima bagi pemegang saham terhadap investasi yang ditanamkan.

$$ROE = \frac{Laba Bersih}{Ekuitas} \dots\dots\dots (6)$$

c. *Net Profit Margin (NPM)*

Menurut Alexandri (2008, p. 200) *net profit margin* adalah rasio yang dipakai untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam hal menghasilkan keuntungan bersih sesudah dipotong pajak. Menurut Kasmir (2013, p. 200) rumus *net profit margin* (NPM) adalah sebagai berikut:

$$Net Profit Margin = \frac{Laba bersih setelah pajak}{penjualan} \dots\dots\dots (7)$$

d. *Operating Profit Margin (OPM)*

Menurut Gitman (2008, p. 65) *operating profit margin* adalah rasio yang mengukur persentase dari setiap penjualan yang tersisa setelah (dikurangi) semua biaya dan beban selain bunga, pajak, dan dividen saham preferen.

$$OPM = \frac{Laba Operasi}{Penjualan} \dots\dots\dots (8)$$

e. *Gross Profit Margin (GPM)*

Menurut Sawir (2009, p. 18) *gross profit margin* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok ataupun biaya produksi, mengindikasikan kemampuan suatu perusahaan untuk memproduksi dengan efisien.

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\% \dots\dots\dots (9)$$

2.2.9 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan

Pengawasan yang tidak efektif dari dewan komisaris akan menimbulkan masalah keagenan. Apabila dewan komisaris yang ada pada suatu perusahaan semakin sedikit maka pengawasan yang dilakukan terhadap pihak manajemen tingkat atas tidak efektif dan tindakan kecurangan akan meningkat. Hal itu bisa membuat kinerja perusahaan semakin buruk.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ika & Wahyu (2013) didapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal ini dianggap bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar dianggap mampu menstimulus pertukaran pengetahuan dan informasi antar anggota dewan komisaris (Ishaqq *et al.*, 2009). Ujunwa (2012) menyatakan bahwa dengan adanya transfer pengetahuan dan informasi ini, diharapkan dewan komisaris bisa lebih mengetahui tentang kondisi perusahaan dan iklim industri yang tengah dihadapi sehingga dewan komisaris dapat menghasilkan keputusan yang efektif sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

2.2.10 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan direksi dalam suatu perusahaan dapat menentukan kebijakan yang diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang (Bodroastuti, 2009). Ukuran

dewan direksi dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan direksi. Peningkatan ukuran dewan direksi dapat memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Pearce & Zahra, 1992).

Hasil penelitian Gil & Obradovich (2012) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan apabila ukuran dewan direksi yang ada dalam suatu perusahaan semakin besar maka pengeluaran perusahaan juga bertambah besar dan hal ini dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan.

2.2.11 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan

Salah satu fungsi utama dari komisaris independen yaitu untuk menjalankan fungsi *monitoring* yang bersifat independen terhadap kinerja perusahaan. Komisaris independen bertindak sebagai wakil dari *stakeholder* untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Sheikh, Khan, & Wang (2013) menyatakan bahwa adanya komisaris independen diharapkan dapat mengurangi sikap oportunistik manajer dan semakin tingginya proporsi komisaris independen dapat memonitor perusahaan dengan lebih dekat, dan melakukan tindakan terkait dengan tata kelola perusahaan yaitu mengurangi manajemen puncak yang memiliki kinerja buruk.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Melia & Yulius (2015) yaitu komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka ROA perusahaan akan turun (kemampuan perusahaan dalam hal profitabilitas rendah). Apabila semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan maka pengeluaran

perusahaan untuk menggaji komisaris independen semakin besar pula. Sehingga hal ini dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pandya (2011) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ROA. Pandya (2011) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen yang optimal dan rasional berkisar antara 30% – 50% dikatakan efektif dalam meningkatkan ROA.

2.2.12 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

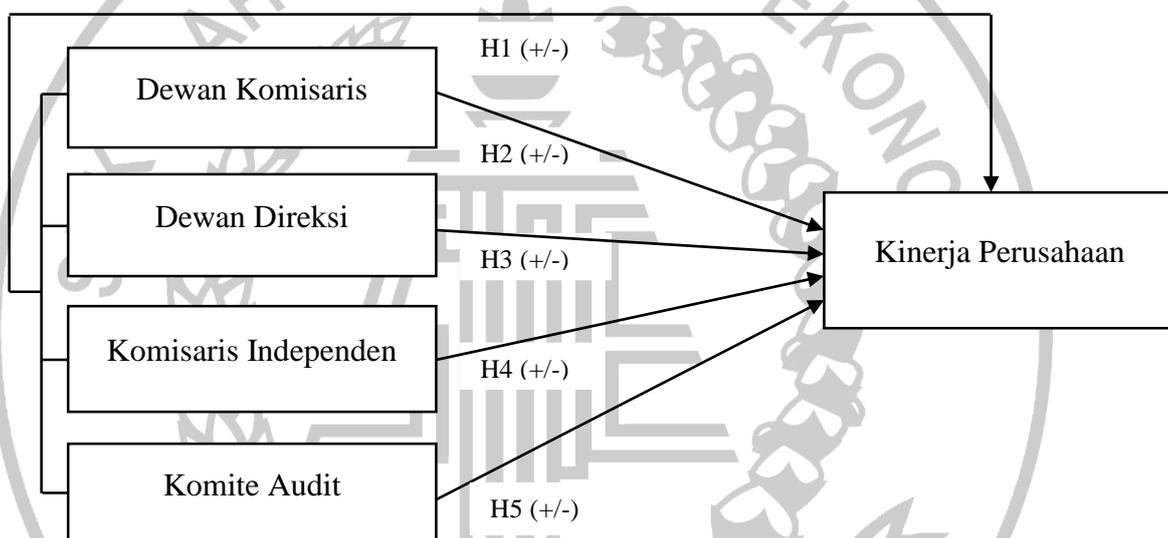
Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan – perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah komite audit.

Anderson *et al.*, (2004) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan, dan pada akhirnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hapsoro (2008) serta Gil & Obradovich (2012) menyatakan terdapat hubungan positif antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan. Akan tetapi, Romano *et al.*, (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan perusahaan. Romano *et al.*, (2012) menyatakan dengan jumlah komite audit yang lebih sedikit,

pengendalian internal akan menjadi lebih baik, meningkatkan kewaspadaan atas kegiatan dan keputusan dewan yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan landasan teori dan beberapa hasil penelitian sebelumnya maka kerangka pemikiran yang digambarkan dalam penelitian ini adalah seperti berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis penelitiannya yaitu sebagai berikut:

Keterangan:

H1 : Dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit secara bersama – sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

- H2 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
- H3 : Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
- H4 : Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
- H5 : Komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

